



## **Apakah Zakat, Infaq dan Sedekah dapat Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi?**

*Can Zakat, Infaq and Alms Encourage Economic Independence?*

**Achmat Subekan<sup>a</sup>, Azwar<sup>b</sup>**

<sup>a</sup> Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK, Kementerian Keuangan, Indonesia; Email: achmat.subekan@gmail.com

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: azwar.iskandar@gmail.com

### **ARTICLE INFO**

Article history:

Received: 25 May 2022

Revised: 26 May 2022

Accepted: 26 May 2022

Published: 27 May 2022

### **Keywords:**

*zakat, infaq, alms, economic independence*

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of zakat, infaq, and alms received by mustahik on their independence in meeting their economic needs. This study uses data obtained from respondents through questionnaires and a quantitative approach through the component-based or variant-based Structural Equation Modeling (SEM) technique with Partial Least Square (PLS). The results of the study show that: (1) zakat has a positive effect on mustahik's economic independence. This means that the respondent's perception of the zakat received based on the measured indicators will encourage the birth of the respondent's economic independence; (2) infaq and alms have a significant effect on mustahik's economic independence. This means that the respondent's perception of the infaq and alms received based on the measured indicators will encourage the birth of the respondent's economic independence. The government needs to give greater attention to the handling of homeless people, beggars, buskers, and street children. Likewise, BAZ and LAZ need to touch the homeless, beggars, buskers, and street children in distributing zakat, infaq, and alms. Distribution of zakat, infaq, and alms funds should be aimed at empowerment programs/activities that lead to increased productivity of mustahik.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat, infaq, dan sedekah yang diterima oleh para mustahik terhadap kemandirian mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dan pendekatan kuantitatif melalui teknik Pemodelan *Structural Equation Modelling* (SEM) berbasis komponen atau varian dengan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) zakat berpengaruh positif terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini berarti bahwa persepsi responden terhadap zakat yang diterima berdasarkan indikator-indikator yang diukur, akan mendorong lahirnya kemandirian ekonomi responden; (2) infaq dan sedekah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini berarti bahwa persepsi responden terhadap infaq dan sedekah yang diterima berdasarkan indikator-indikator yang diukur, akan mendorong lahirnya kemandirian ekonomi responden. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penanganan gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Begitu pula, BAZ dan LAZ perlu menyentuh masyarakat gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan dalam menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah hendaknya ditujukan untuk program/kegiatan pemberdayaan yang mengarah pada meningkatnya produktivitas mustahik.

---

**How to cite:**

Achmat Subekan, Azwar, "Apakah Zakat, Infak dan Sedekah dapat Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi?", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022): 78-101. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.539.

---

## PENDAHULUAN

Manusia menginginkan kehidupan yang bahagia, baik secara material, spiritual, individual, maupun sosial.<sup>1</sup> Dalam ilmu ekonomi, kebahagiaan dan kebaikan hidup tersebut sering disebut sebagai *welfare* (kesejahteraan).<sup>2</sup> Kesejahteraan yang hendak diwujudkan dalam perekonomian bukan kesejahteraan perseorangan, melainkan kesejahteraan bersama.<sup>3</sup> Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berkepentingan dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, kesejahteraan perlu dicapai secara bersama-sama sehingga satu pihak dapat membantu pihak yang lainnya.

Seperti halnya kebanyakan negara yang ada di dunia, Indonesia juga menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan negara. Tujuan tersebut seringkali diistilahkan dengan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Walaupun demikian, di Indonesia masih dapat dengan mudah dijumpai kelompok masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada pemberian dan belas kasihan pihak lain, baik masyarakat maupun pemerintah. Di kota-kota besar, termasuk Makassar, dapat dengan mudah dijumpai gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Terhadap kelompok masyarakat yang demikian, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi mengamanatkan untuk melindungi dan memelihara mereka. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*".

Perlindungan dan pemeliharaan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah membantu mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga dapat hidup layak dan tidak lagi bergantung pada pihak lain. Perlindungan dan pemeliharaan kepada mereka sama sekali bukan ditujukan untuk memelihara kemiskinan dan keterlantaran mereka. Amanat konstitusi ini ternyata tidak mudah untuk dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan tetap adanya kaum fakir miskin dan anak terlantar. Bahkan dari waktu ke waktu jumlah mereka cenderung mengalami peningkatan. Fenomena sosial seperti ini banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia.

Sebagai bagian dari anggota masyarakat, setiap orang dituntut untuk memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat tidak membenarkan orang yang hidup bergelimang harta sementara orang di sekelilingnya menderita kelaparan. Demikian juga terhadap kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi seperti para gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Orang-orang yang kurang beruntung ini perlu mendapatkan santunan dan bantuan ekonomi yang dapat mendorongnya keluar dari kesulitan ekonomi yang dialami.

Ekonomi Islam sebagai sistem perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan umat memiliki ajaran berupa zakat, infak, dan sedekah. Ketiganya merupakan instrumen transfer kekayaan dari si kaya kepada si miskin. Secara *fiqhiyah*, zakat merupakan pemberian dari si kaya (muzaki) kepada mustahik (delapan *asnaf*) yang memiliki hukum wajib. Infak adalah pembelanjaan atau pemberian harta untuk kepentingan kebaikan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Munrokhim Misanam dkk, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: P3EI UII, 2011), h. 1.

<sup>2</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Microeconomics*. Terj. Nur Rosyidah dkk, *Ilmu Mikro Ekonomi*. (Jakarta: Media Global Edukasi, 2003), h. 470.

<sup>3</sup> Mikhael Dua. *Filsafat Ekonomi* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 17-18.

<sup>4</sup> Tim Prime Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gita Media Press, t.th.), h. 345.

Pemberian ini misalnya ditujukan untuk pembangunan masjid, panti asuhan, membiayai kegiatan dakwah Islam, dan sebagainya. Apabila dilihat dari peruntukannya, maka infak lebih diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sosial ataupun keagamaan (Islam). Salah satu ayat yang mendasari dianjurkannya infak adalah Q.S. al-Baqarah/2: 261 di bawah ini.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١

Terjemahnya:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”<sup>5</sup>

Sesuai dengan ayat tersebut, infak dimaksudkan untuk kepentingan tegaknya agama Allah sehingga tidak diberikan kepada masyarakat miskin secara langsung. Seluruh masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil infak, termasuk masyarakat miskin. Misalnya, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai sarana atau infrastruktur yang dibiayai dari hasil infak. Infak pun dapat dimanfaatkan untuk program pengentasan kemiskinan. Sedangkan sedekah merupakan pembelanjaan harta untuk diberikan kepada orang miskin ataupun kepada orang yang secara ekonomi membutuhkan bantuan. Sedekah dapat berupa makanan, pakaian, uang, ataupun barang-barang kebutuhan lainnya.

Kemiskinan tidak hanya menyangkut kelemahan ekonomi seseorang. Di dalamnya terdapat beberapa karakter yang menjadikan seseorang miskin. Kusuma<sup>6</sup> menguraikan karakter kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, modal, maupun keterampilan. Ketidadaan faktor-faktor produksi ini berdampak pada ketidakmampuan yang bersangkutan dalam menghasilkan pendapatan;
2. Tidak memiliki kemampuan yang memungkinkan dirinya menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya;
3. Pendidikan yang rendah. Secara umum masyarakat miskin memiliki pendapatan yang rendah. Untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan saja mereka merasa kesulitan, apalagi memenuhi kebutuhan akan pendidikan;
4. Sebagian besar masyarakat miskin tinggal di perdesaan dan tidak memiliki tanah sendiri. Walaupun memiliki, tanah tersebut sangat kecil/sempit dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya;
5. Sebagian masyarakat miskin tinggal di perkotaan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas/rendah sehingga mereka kesulitan untuk bersaing dengan masyarakat pada umumnya dalam meraih pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), h. 55.

<sup>6</sup> Dimas Bagus Wiranata Kusuma. *The Power of Zakah in Poverty Alleviation*. (Selangor: University Kebangsaan Malaysia, 2010), h. 8.

Ciri-ciri di atas mengarah pada satu pemahaman bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki banyak keterbatasan yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak.

Kemiskinan yang dialami seseorang jauh dari kondisi ideal yang diharapkan dalam mencapai *falāh* ataupun kesejahteraan. Masyarakat miskin berada dalam keadaan ekonomi yang sulit. Walaupun demikian, masyarakat miskin masih memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Keadaan yang lebih memprihatinkan adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri. Mereka menggantungkan pemenuhan kebutuhan ekonominya kepada masyarakat dengan cara mengemis atau meminta-minta.

Kota Makassar tidak hanya menghadapi masalah kemiskinan. Kehidupan sebagian warga kota ini yang sangat bergantung pada belas kasihan orang lain juga harus mendapatkan perhatian. Gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan dapat dengan mudah dijumpai di jalan-jalan Kota Makassar. Dari waktu ke waktu jumlah mereka cenderung mengalami peningkatan. Para pengemis adalah orang yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan ekonominya kepada pihak lain. Rasa iba dan belas kasihan mendorong orang lain untuk memberi mereka uang ataupun kebutuhan ekonomi lainnya. Dewasa ini, status pengemis telah menjelma dengan berbagai nama dan sebutan. Sebagian mereka disebut dengan gelandangan, pengamen, ataupun anak jalanan. Dimungkinkan juga ada istilah-istilah lain untuk menyebut mereka. Ciri utama kelompok masyarakat ini adalah adanya ketergantungan yang besar terhadap pemberian dan belas kasihan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Zakat, infak, dan sedekah sangat relevan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Masyarakat pengemis yang sangat bergantung pada belas kasihan orang lain adalah bagian dari masyarakat miskin, bahkan mereka menunjukkan kemiskinan yang amat parah. Beberapa peneliti telah meneliti pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap kemandirian ekonomi para penerimanya. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena yang dijadikan variabel tergantung (*dependent variable*) adalah kemandirian ekonomi, bukan kemiskinan. Di samping itu, terdapat anggapan bahwa zakat, infak, dan sedekah justru melanggengkan kemiskinan. Misalnya, orang yang tahun kemarin menerima zakat beranggapan bahwa tahun ini juga berhak menerima zakat sehingga mereka tidak merasa mampu untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Uraian pada latar belakang di atas menunjukkan adanya ketimpangan (*gap*) antara kondisi ideal (*dassein*) dengan kondisi nyata (*dassolen*). Ketentuan dalam konstitusi dan peraturan perundangan mestinya menjadi arah bagi para penyelenggaran pemerintahan dan negara. Ajaran Islam mestinya menjadi tuntunan bagi para pemeluknya. Zakat, infak, dan sedekah mestinya dapat mengurangi kemiskinan dan ketergantungan mereka terhadap pemberian dan belas kasihan orang lain. Hal terakhir inilah yang merupakan masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti mengenai zakat, infak, dan sedekah ini. Penelitian tentang zakat relatif lebih banyak dilakukan daripada infak dan sedekah. Hal ini dapat dipahami mengingat zakat merupakan ajaran yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu (*muzaki*).

Kusuma dalam penelitiannya yang berjudul “*The Power of Zakah in Poverty Alleviation*” mengungkapkan bahwa zakat merupakan faktor penting dan efektif dalam

memenuhi kebutuhan sosial golongan yang miskin.<sup>7</sup> Zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Untuk mencapai efektivitas zakat dalam mengatasi kemiskinan tersebut, beberapa saran yang diberikan dalam penelitian tersebut di atas adalah:

1. Pemerintah dan masyarakat perlu sama-sama menyosialisasikan atau mempromosikan zakat sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan.
2. Peran ulama (ahli fikih) sangat diperlukan dalam menyampaikan aturan zakat yang telah dituangkan dalam Alquran dan Hadis kepada masyarakat.
3. Zakat hendaknya diadministrasikan dengan peraturan perundangan yang dikeluarkan negara sehingga dapat memberikan mandat atau kewenangan yang kuat dalam proses pembayarannya.

Shirazi<sup>8</sup> menemukan bahwa negara-negara muslim dengan penghasilan masyarakat yang rendah (miskin) dapat memanfaatkan berbagai sumber daya zakat yang dimilikinya guna mengatasi kemiskinan yang dialaminya. Definisi miskin yang digunakannya adalah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni masyarakat yang berpenghasilan di bawah USD 1 per hari. Negara-negara muslim yang berpenghasilan rendah memiliki potensi untuk meningkatkan penghasilan penduduknya sehingga keluar dari kemiskinan (yakni pendapatan perkapita lebih dari USD 1 per hari). Namun, Shirazi juga menemukan adanya berbagai kesulitan yang dihadapi negara-negara muslim tersebut untuk memanfaatkan potensi zakatnya. Beberapa kesulitan tersebut antara lain adalah:

1. Tidak digunakannya institusi zakat guna mengatasi kemiskinan yang sedang dialami secara legal yang diatur oleh negara/pemerintah.
2. Sebagian negara muslim telah memperkenalkan sistem pengelolaan zakat secara resmi (legal, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku) tetapi masih belum mengimplementasikan semangat atau spirit yang benar. Hal ini berdampak pada tidak eksisnya institusi pengelola zakat yang terpercaya oleh masyarakat.
3. Beberapa negara muslim masih memiliki potensi zakat yang rendah sehingga sulit untuk mengatasi kemiskinan tersebut melalui zakat. Dana zakat yang terkumpul masih di bawah dari yang diharapkan.

Ahmed<sup>9</sup> menguraikan beberapa strategi untuk mengatasi kemiskinan sebagai berikut:

1. Kebijakan makro ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan per kapita di suatu negara. Pendapatan per kapita yang meningkat akan berimbas pada semakin besarnya pajak yang diterima negara sehingga semakin memudahkan program pengentasan kemiskinan di negara bersangkutan.
2. Kebijakan redistribusi pendapatan. Kebijakan ini dilakukan oleh negara dengan mengatur distribusi pendapatan dengan lebih adil. Kekayaan dan sumber daya ekonomi di suatu negara tidak hanya

---

<sup>7</sup> Dimas Bagus Wiranata Kusuma. *The Power of Zakah in Poverty Alleviation*, h. 1.

<sup>8</sup> Nashim Shah Shirazi. *Providing for The Resource Shortfall for Poverty Elimination Through The Institution of Zakah in Low Income Muslim Countries* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia: *Journal of Economics and Management* 14, no. 1, 2006) h. 1.

<sup>9</sup> Habib Ahmed, *Zakah, Macroeconomics Policies, and Poverty Alleviation: Lesson from Simulations on Bangladesh* (*Bangladesh: journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 2004), h. 87-89.

dinikmati oleh golongan kaya, tetapi juga harus bisa membebaskan kaum miskin dari derita kemiskinannya.

3. Peningkatan kapasitas dan kreativitas.

Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan mikro, misalnya mendorong tumbuhnya industri rumah tangga dan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat miskin untuk berkreasi menciptakan lapangan usaha.

4. Dukungan pendapatan.

Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan subsidi kepada para manula, dan penyandang cacat sehingga pendapatan yang diperolehnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan layak.

5. Pengurangan kemiskinan melalui peran zakat.

Zakat dapat memainkan perannya bersama-sama dengan empat strategi sebelumnya. Strategi meningkatkan pertumbuhan, redistribusi pendapatan, peningkatan/pemberdayaan dan kreativitas, dan dukungan/subsidi pendapatan merupakan nilai-nilai yang dimiliki dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selanjutnya, Ahmed juga menyimpulkan bahwa zakat perlu diarahkan sebagai kebijakan makro untuk meningkatkan pertumbuhan, redistribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Untuk mendapatkan hasil yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, maka zakat harus digunakan untuk tujuan yang produktif.<sup>10</sup>

Iqbal<sup>11</sup> telah melakukan penelitian mengenai *marginal propensity to consume* (MPC) dalam model perekonomian Islam. Dengan menggunakan model konsumsi milik Keynes ( $C=a+bY$ ), Iqbal memasukkan unsur zakat dan infak yang ada dalam ekonomi Islam. Zakat dan infak tidak dikenal pada ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Dari hasil penelitiannya tersebut, Iqbal menyimpulkan bahwa efek dari zakat dan infak cenderung akan meningkatkan MPC. Namun, peningkatan tersebut tidak akan jauh berbeda dengan MPC pada perekonomian sekuler (kapitalis dan sosialis).<sup>12</sup>

Irfan Syauqi Beik dalam meneliti peran zakat terhadap upaya pengurangan kemiskinan memiliki kesimpulan:

1. Zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%;
2. Zakat mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan;
3. Zakat mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan.<sup>13</sup>

Semua kesimpulan di atas membuktikan bahwa zakat tidak hanya mampu mengurangi kemiskinan, tetapi juga mampu mendistribusikan pendapatan masyarakat secara lebih merata.

Penelitian Dogarawa<sup>14</sup> juga menghasilkan kesimpulan yang senada. Kebutuhan hidup minimal masyarakat miskin seolah-olah telah diasuransikan dengan adanya zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muzaki. Selanjutnya, untuk mengaktifkan dan merevitalisasi zakat bagi perekonomian masyarakat muslim maka dibutuhkan reformasi

---

<sup>10</sup> Habib Ahmed, *Zakah, Macroeconomics Policies, and Poverty Alleviation: Lesson from Simulations on Bangladesh*, h. 81.

<sup>11</sup> Munawar Iqbal, *Zakah, Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy* (Jeddah: King Abdul Aziz University, Journal Research Islamic Economic, 1985), h. 45.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 59

<sup>13</sup> Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika* (Jakarta: Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. 2, 2009), h. 52.

<sup>14</sup> Ahmad Bello Dogarawa, *Poverty Alleviation Through Zakah and Waqf Institution: A Case for the Muslim Ummah in Ghana* (Ghana: First National Muslim Summit organised by Al-Furqan Foundatuin, 2009), h. 23.

manajemen lembaga-lembaga pengelolanya. Di samping itu, para personil yang terlibat dalam pengelolaannya harus memiliki komitmen yang kuat bagi kepentingan umat.

Gusfahmi,<sup>15</sup> juga menyoroti peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Menurut hasil penelitiannya, solusi untuk mengatasi kemiskinan harus disesuaikan dengan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan. Dalam hal ini masyarakat fakir dan miskin dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Kelompok fakir/miskin yang kuat. Kemiskinan yang dialami oleh kelompok ini diatasi dengan mewajibkan mereka untuk bekerja. Kelompok ini jangan dimanjakan dengan zakat, infak, dan sedekah. Mereka harus bekerja dan mencari karunia Allah (rezeki) yang ada di muka bumi.
2. Kelompok fakir/miskin yang lemah dan memiliki kerabat yang mapan. Fakir miskin ini sangat membutuhkan kepedulian orang lain, terutama dari karib kerabatnya. Secara moral, kerabatnya tersebut juga berkewajiban untuk menjamin kebutuhan minimal hidupnya agar tidak menjadi peminta-minta.
3. Kelompok fakir miskin yang lemah dan tidak memiliki kerabat. Yang terakhir ini merupakan kelompok yang paling memprihatinkan. Kepada mereka dapat diberikan zakat, infak, dan sedekah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terhindar dari meminta belas kasihan orang lain (mengemis).

Untuk optimalisasi pemungutan dan pengumpulan zakat, Gusfahmi menyarankan agar hal tersebut dilakukan dalam koordinasi Presiden melalui Menteri Keuangan.

Febianto dkk.<sup>16</sup> menemukan adanya pengaruh zakat yang signifikan terhadap MPC dan tingkat produktivitas mustahik. Dalam level yang lebih luas (makro) hal ini akan meningkatkan simpanan/dana pihak ketiga di bank. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat yang diterima oleh mustahik akan meningkatkan konsumsi mereka. Setelah kebutuhan konsumsi (mendasar/minimal) tersebut telah terpenuhi, maka sisa dana yang diperoleh mustahik akan digunakan untuk keperluan produksi sehingga meningkatkan produktivitasnya. Apabila mereka tidak mampu melakukan proses produksi, maka mereka akan menabungnya sehingga akan menambah jumlah dana pihak ketiga di bank.

Ahmad Erani Yustika dan Jati Andrianto,<sup>17</sup> menegaskan perlunya zakat (dan pajak) guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, zakat tidak hanya dimaksudkan mengatasi kemiskinan, tetapi juga dimaksudkan untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan umat. Apabila semua masyarakat telah terbebas dari kemiskinan, maka tidak berarti kewajiban untuk berzakat menjadi hilang. Zakat tetap menjadi kewajiban setiap umat Islam, apalagi bagi umat yang telah mampu menunaikannya. Semakin baik perekonomian umat, maka semakin banyak pula orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Yustika juga menegaskan bahwa zakat tidak boleh disalurkan dalam bentuk uang tunai ataupun barang kebutuhan pokok lainnya. Apabila zakat disalurkan dalam bentuk uang tunai atau barang kebutuhan pokok seperti itu, maka akan terus menenggelamkan masyarakat miskin tetap berada dalam kemiskinannya. Uang atau barang kebutuhan pokok yang disalurkan tersebut akan habis dikonsumsi dalam waktu pendek dan setelah itu mereka akan mengalami kekurangan/kemiskinan lagi. Hal lain yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa zakat bukan saja menjadi bentuk

---

<sup>15</sup> Gusfahmi, *Rekonstruksi Peran Zakat dan Pajak Untuk Menanggulangi Kemiskinan* (Jakarta: Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol 2, 2009), h. 31-43.

<sup>16</sup> Irawan Febianto dkk, *An Analysis on the Impact of Zakah Programs in Poverty Alleviation: Case Study in Bandung, Indonesia* (Bandung: Padjajaran University, 2011), h. 10.

<sup>17</sup> Ahmad Erani Yustika dan Jati Andrianto, *Zakat, Keadilan, dan Keseimbangan Sosial* (Jakarta: Zakat & Empowering, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. I, 2008).

pertanggungjawaban pembayarannya (muzaki) atas rezeki yang diterimanya dari Allah swt, tetapi juga merupakan instrumen dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan sosial. Melalui zakat akan tercipta distribusi kekayaan yang lebih adil.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa zakat dapat memainkan peran yang utama dalam pengentasan kemiskinan. Paling tidak, zakat akan memberikan jaminan hidup bagi sebagian umat Islam (kaum *du'afa*) dalam memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Zakat, infak, dan sedekah akan meningkatkan pendapatan para penerimanya (*mustahik*). Kemampuan ekonomi mereka menjadi bertambah sehingga mampu hidup layak dan bekerja lebih baik. Akibat lebih lanjut adalah adanya kemampuan pada diri mustahik untuk mandiri, tidak bergantung pada pemberian dan belas kasihan orang lain.

Penelitian ini memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya tersebut di atas. Secara umum, penelitian sebelumnya meneliti peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian-penelitian tersebut melihat kemiskinan sebagai fenomena sosial yang perlu diatasi dengan meningkatkan penghasilan kaum miskin.

Dalam penelitian ini, variabel terikat yang diteliti bukan kemiskinan secara umum, tetapi kemandirian ekonomi masyarakat miskin yang terdiri atas gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Bisa jadi kemandirian ekonomi merupakan indikator terbebasnya seseorang dari kemiskinan, tetapi keduanya tetap memiliki perbedaan. Orang miskin belum tentu tidak memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki kemandirian ekonomi belum tentu tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal ekonominya.

Mustahik yang menjadi objek penelitian di sini bukan masyarakat miskin pada umumnya seperti yang diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Objek penelitian ini adalah masyarakat yang tidak memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Contoh dari masyarakat ini adalah para gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan pengamen jalanan. Mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya karena sangat bergantung pada belas kasihan orang lain. Mereka memang sering diidentikkan sebagai masyarakat miskin, tetapi penghasilan mereka dari belas kasihan orang lain seringkali bernilai di atas garis kemiskinan.

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan yang sangat berarti, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh para mustahik terhadap kemandirian mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Secara rinci, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui pengaruh zakat yang diterima mustahik terhadap upaya mewujudkan kemandirian ekonomi mereka;
2. untuk mengetahui pengaruh infak dan sedekah yang diterima mustahik terhadap upaya mewujudkan kemandirian ekonomi mereka.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengambilan keputusan. Kontribusi tersebut dapat diketahui dari kegunaan penelitian ini yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memperkaya khasanah keilmuan di bidang ekonomi Islam. Hasil penelitian akan memperkuat bangunan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan. Zakat, infak, dan sedekah hanya ada di ekonomi Islam dan tidak ada di sistem ekonomi lainnya. Sebagai ajaran yang unik, zakat, infak, dan sedekah perlu mendapatkan

perhatian pengembangan yang lebih spesifik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pemicu bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Memberikan masukan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat, dalam upaya pengentasan kemiskinan pada umumnya ataupun pembebasan kota dari gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan pada khususnya. Masalah sosial ini sudah bertahun-tahun dihadapi oleh banyak kota besar di Indonesia, namun solusi tidak kunjung diperoleh. Bahkan komunitas mereka cenderung mengalami peningkatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengambil keputusan dalam memberdayakan mereka sehingga tidak lagi menggelandang, mengemis, mengamen, dan menjadi anak jalanan.
3. Memberikan masukan kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah dalam mendistribusikan dana muzaki yang dikelolanya sehingga memberikan manfaat yang terbesar bagi mustahik. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh lembaga pengelola zakat. Landasan pengelolaannya tidak hanya didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga didukung dengan hasil penelitian secara ilmiah.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Untuk itu, di dalamnya dirumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan dugaan awal yang didasarkan pada pemikiran dan teori yang ada. Adapun hipotesis yang diberikan terhadap masalah pokok dalam penelitian ini adalah bahwa zakat, infak, dan sedekah berpengaruh positif terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Dengan zakat, infak, dan sedekah, para mustahik paling tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya sehingga dapat bekerja dengan baik dan memperoleh penghasilan. Selain dengan bekerja, kemandirian tersebut juga dapat terwujud melalui kegiatan produktif yang dibiayai dari zakat, infak, dan sedekah. Secara rinci, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi mustahik;

H<sub>2</sub> : infak dan sedekah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi mustahik.

### ***Metode Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Untuk itu, penelitian ini mengukur variabel-variabel yang ada dengan mewujudkannya dalam bentuk nilai atau angka. Angka-angka tersebut selanjutnya dianalisis, hubungan antarvariabel yang satu dengan variabel yang lain.

Data primer primer penelitian diperoleh langsung dari objek penelitian melalui instrumen angket/kuesioner, yakni para mustahik yang terdiri atas gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Peneliti secara langsung memperoleh data dari para gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan istilah “mustahik” untuk objek penelitian tersebut. Ciri utama mustahik yang menjadi objek penelitian ini adalah memiliki ketergantungan besar terhadap pihak atau orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Para pengemis, gelandangan, pengamen, dan anak jalanan tersebut mengandalkan pemberian orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Sementara data sekunder penelitian diperoleh dari pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi untuk menjelaskan objek penelitian, seperti lembaga/badan pengelola zakat, infak, dan sedekah, instansi pemerintah yang menangani

masalah sosial dan kemiskinan, dan lembaga-lembaga masyarakat lain, baik swasta maupun pemerintah, yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara geografis, objek penelitian dibatasi hanya pada *mustahik* yang berada di Kota Makassar. Dipilihnya Kota Makassar sebagai tempat penelitian adalah karena faktor kemudahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Di samping itu, di kota ini terdapat cukup banyak gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan yang merupakan gejala yang umum di kota-kota besar. Makassar adalah salah satu kota besar di Indonesia.

Populasi penelitian ini adalah *mustahik* yang ada di Kota Makassar. Mereka terdiri dari kelompok masyarakat miskin dengan penghasilan rendah dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemberian (belas kasihan) orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan demikian, *mustahik* dalam penelitian ini tidak mencakup seluruh golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Q.S. al-Maidah/5: 60. Populasi penelitian hanya mencakup fakir dan miskin yang sangat bergantung pada pemberian orang lain dalam menopang kebutuhan ekonominya yang sering disebut dengan gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Sementara sampel penelitian ini berjumlah 100 jiwa dan diambil dari kalangan gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan yang ada di Kota Makassar. Jumlah sampel dihitung berdasarkan jumlah populasi yang ada, yaitu 11.271 jiwa.<sup>18</sup> Perhitungan sampel diuraikan dengan rumus sebagai berikut:<sup>19</sup>

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot \alpha^2)}$$

dimana:

- $n$  : jumlah sampel penelitian
- $N$  : Jumlah populasi penelitian
- $\alpha$  : *error level* (tingkat kesalahan)

Dengan menggunakan rumus di atas dan tingkat kesalahan (*error level*) sebesar 10% (tingkat signifikansi) maka jumlah sampel penelitian ini ditetapkan:

$$n = \frac{11.271}{1 + (11.271 \cdot (0.1)^2)}$$

$$n = \frac{11.271}{1 + 112,71}$$

$$n = 99,12$$

$$n = \text{dibulatkan menjadi } 100$$

Penelitian ini menggunakan tiga variabel penelitian yang terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Dalam penelitian ini, variabel zakat dan variabel infak dan sedekah merupakan variabel bebas. Keduanya merupakan variabel yang hendak diteliti pengaruhnya terhadap variabel terikat, yakni kemandirian ekonomi. Definisi dan indikator masing-masing variabel tersebut dijabarkan pada Tabel 1.

<sup>18</sup> Dinas Sosial Kota Makassar.

<sup>19</sup> Rahmady Radiany dalam Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. 105.

Tabel 1. Definisi dan Indikator Variabel

No.	Variabel	Definisi Operainal	Indikator
1	Zakat (X1)	Pendapatan yang diperoleh mustahik dari orang yang berzakat	Variabel ini diukur menggunakan indikator-indikator, yaitu: 1) Saya selalu menerima zakat maal secara langsung dari muzakki setiap tahun. 2) Saya merasa zakat maal tersebut sangat besar dan sangat bermanfaat untuk membiayai kebutuhan ekonomi saya. 3) Saya selalu menerima zakat (fitrah ataupun maal) dari LAZ/BAZ secara tunai (berupa uang ataupun barang makanan/konsumsi). 4) Saya merasa zakat dari LAZ/BAZ tersebut sangat besar/dominan guna membiayai kebutuhan ekonomi hidup saya. 5) Saya merasa zakat dari LAZ/BAZ tersebut sangat besar/dominan guna membiayai kebutuhan ekonomi hidup saya 6) Saya menerima banyak manfaat dari kegiatan pemberdayaan tersebut bagi peningkatan kemandirian perekonomian saya.
2.	Infak dan Sedekah (X2)	Tambahan pendapatan/penghasilan yang diterima mustahik dari lembaga-lembaga sosial baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat (lembaga swadaya masyarakat).	Variabel ini diukur menggunakan indikator-indikator, yaitu: 1) Saya sangat sering mengikuti kegiatan pembinaan dan pemberdayaan (kewirausahaan, keterampilan, dsb) yang diselenggarakan oleh kantor/instansi pemerintah. 2) Saya menerima banyak manfaat dari kegiatan pembinaan tersebut bagi kemandirian perekonomian saya. 3) Saya mendapatkan bantuan permodalan dari Kantor/Dinas pemerintah untuk memajukan perekonomian/usaha saya. 4) Bantuan modal yang saya terima tersebut sangat besar dan mencukupi untuk usaha/bisnis saya 5) Saya sering mengikuti kegiatan pembinaan dan pemberdayaan (kewirausahaan, keterampilan, dsb.) yang diselenggarakan oleh perseorangan/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 6) Saya menerima banyak manfaat dari kegiatan pembinaan/pemberdayaan tersebut bagi kemandirian perekonomian saya. 7) Saya mendapatkan bantuan modal dari LSM untuk memajukan perekonomian/usaha saya. 8) Bantuan modal tersebut sangat bermanfaat bagi kemajuan usaha/bisnis saya. 9) Saya sering mengikuti kegiatan pembinaan dan pemberdayaan (kewirausahaan, keterampilan, dsb.) sesuai dengan bidang usaha saya yang diselenggarakan oleh lembaga zakat (BAZ/LAZ). 10) Saya menerima banyak manfaat dari kegiatan pemberdayaan oleh BAZ/LAZ tersebut bagi kemandirian perekonomian saya. 11) Saya mendapatkan bantuan modal dari BAZ/LAZ untuk memajukan perekonomian/usaha saya. 12) Saya memperoleh banyak manfaat dari bantuan modal tersebut bagi kemajuan usaha/bisnis saya
3.	Kemandirian Ekonomi (Y)	Sebuah kondisi seseorang yang tidak memiliki ketergantungan terhadap orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya walaupun masih berada dalam batas yang sederhana.	Variabel ini diukur menggunakan indikator-indikator, yaitu: 1) Penghasilan yang saya peroleh telah mendorong saya untuk bekerja/melakukan usaha dan tidak menggantungkan diri pada pemberian orang lain. 2) Saya tidak akan beroperasi lagi di jalanan apabila kebutuhan makanan/minuman pada hari itu telah terpenuhi. 3) Sebagian besar penghasilan saya berasal dari keuntungan usaha dagang atau upah. 4) Penghasilan dari usaha dagang/upah yang saya peroleh sudah sangat besar. 5) Saya dapat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dari hasil berdagang/upah yang saya peroleh. 6) Saya yakin suatu saat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa menggantungkan dari pada pemberian orang lain.

Model penelitian di atas dianalisis dengan teknik Pemodelan Persamaan Struktural atau *Structural Equation Modelling* (SEM) berbasis komponen atau varian (*component based*) yang populer dengan *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan program

*SmartPLS*<sup>20</sup>. Teknik ini dipilih dengan alasan bahwa teknik PLS tidak membutuhkan banyak asumsi. Data tidak harus berdistribusi *normal multivariate* dan jumlah sampel tidak harus besar (Ghozali merekomendasikan antara 30-100). Selain itu, teknik ini banyak dipakai untuk analisis kausal-prediktif (*causal-predictive analysis*) yang rumit dan merupakan teknik yang sesuai untuk digunakan dalam aplikasi prediksi dan pengembangan teori seperti pada penelitian ini. Selain itu, mengingat jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini kecil maka PLS digunakan sebagai alat analisisnya<sup>21</sup>.

Teknik PLS penelitian menerapkan dua macam komponen pada model kausal yaitu: model pengukuran (*measurement model*) dan model struktural (*structural model*).

Pertama, menilai atau evaluasi model pengukuran (*measurement model*). Model pengukuran adalah penilaian terhadap reliabilitas dan validitas variabel penelitian atau didefinisikan sebagai hubungan antara indikator dengan variabel laten. Kriteria untuk menilai model pengukuran dalam penelitian ini yaitu:

- a. Validitas Konvergen (*Convergent Validity*) dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Validitas konvergen bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Validitas konvergen dinilai berdasarkan korelasi antara skor item dengan skor variabel. Nilai loading memiliki tingkat validitas tinggi jika lebih besar dari 0,5. Nilai loading yang lebih kecil dari 0,5 akan dihilangkan (*dropped*) dalam model dan dilakukan estimasi ulang<sup>22</sup>.
- b. Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*) digunakan untuk membuktikan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Ghozali<sup>23</sup> mengatakan bahwa metode untuk mengukur *discriminant validity* adalah dengan melihat nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. Jika nilai AVE setiap konstruk lebih besar dari 0,5 maka model dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik. Berikut rumus untuk menghitung AVE:

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum_i \text{var}(\epsilon_i)}$$

di mana  $\lambda_i$  adalah *component loading* ke indikator dan  $\text{var}(\epsilon_i) = 1 - \lambda_i^2$ . Jika semua indikator di-*standardized*, maka ukuran ini sama dengan *average communalities* dalam blok.

- c. Realibilitas Konstruk (*Composite Reliability*) blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* dan *cronbach's alpha*. Dengan menggunakan output yang dihasilkan oleh PLS, maka *composite reliability* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Pc = \frac{(\sum \lambda_i)^2}{(\sum \lambda_i)^2 + \sum_i \text{var}(\epsilon_i)}$$

dimana  $\lambda_i$  adalah *component loading* ke indikator dan  $\text{var}(\epsilon_i) = 1 - \lambda_i^2$ . Pc sebagai ukuran *internal consistency* hanya dapat digunakan untuk konstruk indikator

---

<sup>20</sup> Ghozali, Imam. "Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19." *Semarang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro* (2011).

<sup>21</sup> Jogiyanto, Hartono M. "Metodologi Penelitian Bisnis: salah kaprah dan pengalaman-pengalaman." *Yogyakarta: BPFE* (2004).

<sup>22</sup> Ghozali, Imam. "Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19." *Semarang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro* (2011).

<sup>23</sup> *Ibid.*

refleksif. Chin dalam Ghozali<sup>24</sup> menyatakan suatu variabel laten memiliki reliabilitas yang tinggi apabila nilai *composite reliability* di atas 0,7 dan atau *Conbach's Alpha* di atas 0,6.

Setelah dilakukan penilaian model pengukuran (*measurement model*) untuk meyakinkan bahwa pengukuran-pengukuran konstruk valid dan reliabel, maka dilakukan pengujian tahap berikutnya.

Kedua, menilai atau evaluasi model struktural (*structural model*). Pengujian model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk atau variabel laten, yang dilihat dari nilai *R-Square* ( $R^2$ ) dari model penelitian dan nilai estimasi koefisien jalur strukturalnya (*estimate for path coefficients*). Nilai *R-Square* ( $R^2$ ) adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Koefisien determinasi diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel eksogen dalam menjelaskan varians dari variabel endogennya. Menurut Chin (1998), nilai *R-Square* sebesar 0.67 (kuat), 0.33 (moderat) dan 0.19 (lemah).

Nilai estimasi koefisien jalur struktural pada model (*estimate for path coefficients*) merupakan nilai koefisien jalur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel (konstruk). Nilai estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang diperoleh lewat prosedur *bootstrapping*<sup>25</sup>. *Bootstrapping* adalah metode yang berbasis komputer yang digunakan untuk pengukuran akurasi dari taksiran statistik (pendugaan besaran statistik dan selang kepercayaan). *Pem-bootstrap-an* merupakan teknik nonparametrik secara inferensial. Penerapan metode resampling dalam *bootstrapping* memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas (*distribution free*), tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar (direkomendasikan sampel minimum 30). Pengujian dilakukan dengan uji t-statistik (*t-test*), dengan kriteria jika diperoleh nilai *p-value*  $\leq 0,05$  (*alpha* = 5 %), maka disimpulkan signifikan dan sebaliknya.

## PEMBAHASAN

### Evaluasi Model Pengukuran

Analisis data penelitian diawali dengan melakukan evaluasi model pengukuran yang bertujuan untuk mengukur validitas dan reliabilitas variabel dalam penelitian. Tingkat validitas dan reliabilitas dapat dilihat melalui validitas konvergen, validitas diskriminan dan reliabilitas konstruk (Ghozali, 2008). Hasil olah data untuk melihat nilai muatan (*loading*) dalam rangka menguji validitas konvergen (*convergent validity*) indikator penelitian adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Muatan (*Loading*) Indikator

Variabel	Kode	Nilai Muatan ( <i>Loading</i> )
Zakat (X1)	X11	0.845
	X12	0.760
	X13	0.829
	X14	0.829

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup> Ghozali, Imam. "Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19." Semarang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (2011).

Variabel	Kode	Nilai Muatan ( <i>Loading</i> )
	X15	0.849
	X16	0.818
Infak dan Sedekah (X2)	X21	0.618
	X22	0.713
	X23	0.745
	X24	0.707
	X25	0.611
	X26	0.676
	X27	0.804
	X28	0.716
	X29	0.807
	X210	0.759
	X211	0.719
X212	0.711	
Kemandirian Ekonomi (Y)	Y11	0.742
	Y13	0.823
	Y14	0.868
	Y15	0.851
	Y16	0.572

Sumber: Data Primer (diolah)

Pada Tabel 2, terlihat bahwa semua indikator penelitian telah memiliki nilai muatan (*loading*) lebih dari 0,50 yang menandakan bahwa semua indikator telah memenuhi syarat validitas konvergen. Hal ini berarti bahwa seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian dinyatakan valid (Ghozali, 2008).

Selanjutnya, hasil olah data untuk melihat nilai *cross loading* dalam rangka menguji validitas diskriminan (*discriminant validity*) dan reliabilitas (*composite reliability*) indikator dan variabel penelitian yaitu melihat nilai *cronbach alpha*, *composite reliability* dan AVE adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 1. *Cronbach Alpha*, *Reliability* dan Nilai AVE

Variabel (Konstruk)	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Nilai AVE
Zakat (X1)	0.904	0.926	0.676
Infak dan Sedekah (X2)	0.914	0.927	0.515
Kemandirian Ekonomi (Y)	0.710	0.808	0.538

Sumber: Data Primer (diolah)

Berdasarkan Tabel 3, nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability* pada model untuk semua variabel lebih besar dari 0,6 dan 0,70 sebagai nilai rujukan, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan memenuhi syarat.

Pada Tabel 3 juga terlihat nilai AVE semua variabel lebih besar dari 0,5, sehingga seluruh konstruk dan indikator dinyatakan *reliable*<sup>26</sup>.

### Evaluasi Model Struktural

Setelah penilaian model pengukuran (*measurement model*) dilakukan dan seluruh konstruk penelitian dinyatakan valid dan reliabel, tahapan berikutnya adalah melakukan pengujian atau evaluasi model struktural. Evaluasi Model Struktural menggambarkan hubungan antarvariabel berdasarkan pada *substantive theory*. Menilai model struktural dapat dilakukan dengan cara melihat model struktural yang terdiri dari hubungan yang dihipotesiskan di antara variabel dalam model penelitian.

Dengan menggunakan metode *Bootstrapping* pada *SmartPLS 3*, diperoleh nilai koefisien jalur (*path coefficient*), nilai t-statistik dan P-values sebagaimana terdapat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Koefisien Jalur dan t-Statistik

Jalur Pengaruh	Coefficient	t-statistics	P-values
Zakat (X1) → Kemandirian Ekonomi (Y1)	0.302	2.634	0.009
Infak dan Sedekah (X2) → Kemandirian Ekonomi (Y1)	0.434	3.750	0.000

Sumber: Data Primer (diolah)

Nilai *t-tabel* dihitung terlebih dahulu dengan ketentuan nilai alpha ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 dan *degree of freedom* (*df*) sebesar  $n-2$ . Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100, sehingga nilai *df* adalah 98. Nilai *t-tabel* untuk  $df=98$ , *two tail*, dan  $\alpha=0,05$  adalah 1,66. Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa semua nilai t-statistik pada tabel di atas lebih besar dari nilai *t-tabel* 1,66. Dengan demikian, semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pada jalur-jalur hubungan variabel pada model. Jalur hubungan pada persepsi Zakat (X1) → Kemandirian Ekonomi (Y1) dan Infak dan Sedekah (X2) → Kemandirian Ekonomi (Y1) memiliki jalur hubungan atau pengaruh yang signifikan.

Selain itu, kekuatan untuk menjelaskan atau *explanatory power* yang dimiliki model, dapat dinilai dengan melihat nilai *R-Square* dari konstruk-konstruk atau variabel dependen. Hasil olah data melalui *Bootstrapping* tersebut sebagaimana pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. R-Square ( $R^2$ )

Variabel	R-Square ( $R^2$ )	R-Square ( $R^2$ ) Adjusted
Kemandirian Ekonomi (Y1)	0.473	0.462

Sumber: Data Primer (diolah)

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa pada model, sekitar 47,3% (kuat) dari variabilitas (keragaman) total variabel (konstruk) persepsi terhadap Kemandirian

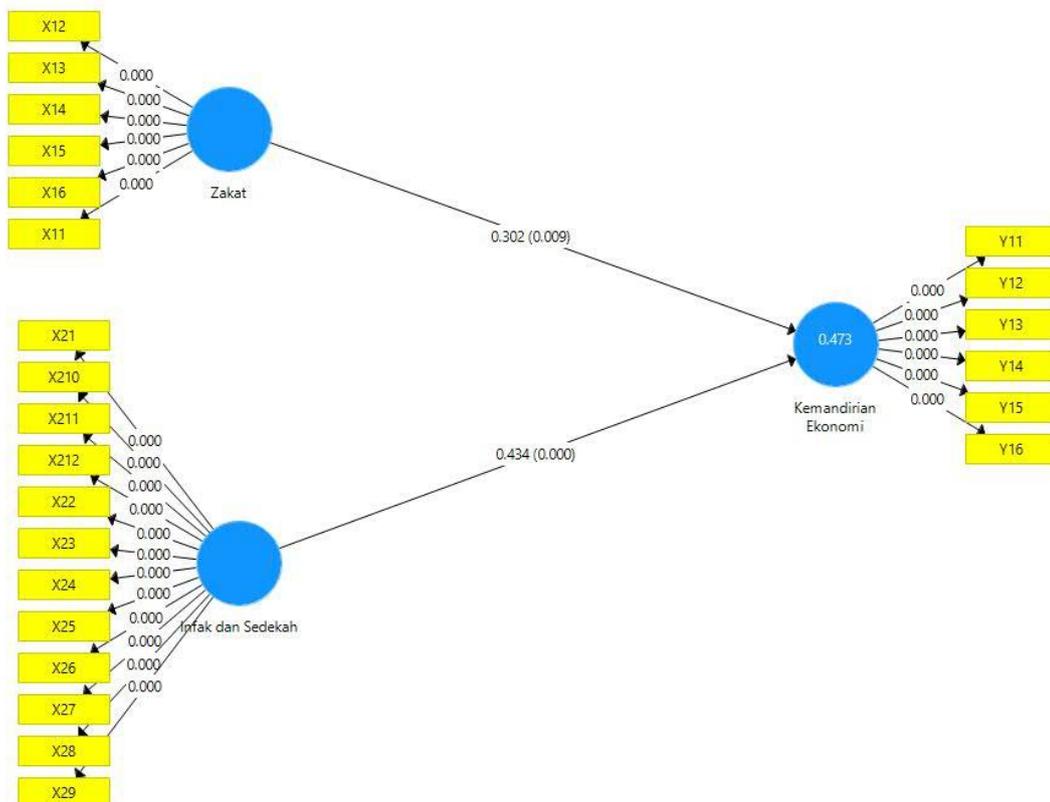
<sup>26</sup> Ghozali, Imam. "Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19." Semarang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (2011).

Ekonomi (Y1) dapat dijelaskan oleh variabel eksogennya yaitu persepsi tentang Zakat (X1) dan Infak dan Sedekah (X2). Artinya, masih terdapat sekitar 52,7% dari keragaman variabel tersebut yang dapat dijelaskan dari faktor-faktor lainnya seperti wakaf, Bantuan Langsung Tunai, sumbangan, dan lainnya.

### Hasil dan Analisis

Setelah melalui beberapa uji (tes) untuk menilai atau evaluasi model pengukuran (*measurement model*) terhadap reliabilitas dan validitas indikator dan variabel penelitian berupa uji *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability* dimana seluruh hasilnya menyatakan bahwa seluruh indikator dan variabel penelitian adalah valid dan *reliable*, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian model struktural (*structural model*). Pengujian model struktural dilakukan untuk melihat pengaruh variabel zakat dan variabel infak dan sedekah terhadap kemandirian ekonomi, yaitu dengan nilai estimasi koefisien jalur struktural (*estimate for path coefficients*) dan nilai *R-Square* ( $R^2$ ) dari model penelitian. Nilai koefisien jalur untuk melihat besarnya pengaruh (positif atau negatif) dan signifikansi dari setiap variabel bebas terhadap terikat. Sementara nilai *R-Square* ( $R^2$ ) menunjukkan seberapa besar kemampuan semua variabel eksogen dalam menjelaskan variasi dari variabel endogennya.

Dari hasil olah data menggunakan *SmartPLS*, diperoleh nilai koefisien jalur (*path coefficient*) dan nilai *t*-statistik serta *P-values* untuk menunjukkan signifikansinya sebagaimana pada Tabel 4. Secara ringkas, Gambar 1 berikut menggambarkan model estimasi PLS dari model penelitian yang diusulkan:



Gambar 1. Hasil Pengujian Model Struktural (*path coefficient dan p-values*)  
Sumber: Data Primer (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, baik pada Tabel 4 maupun Gambar 1, semua hasil analisis mendukung hipotesis yang diajukan dengan arah hubungan yang positif. Variabel Zakat ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi dan variabel Infak dan Sedekah juga ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi.

### ***Pengaruh Zakat Terhadap Kemandirian Ekonomi***

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menyatakan bahwa variabel zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi. Hasil analisis menemukan bahwa hubungan variabel zakat terhadap kemandirian ekonomi memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,302 dan nilai *p-values* sebesar 0,009. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur adalah positif dan nilai *p-values* lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi sehingga  $H_1$  dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap zakat dengan indikator-indikator berupa: (1) menerima zakat maal secara langsung dari muzakki setiap tahun; (2) merasa zakat maal tersebut sangat besar dan sangat bermanfaat untuk membiayai kebutuhan ekonom; (3) menerima zakat (fitrah ataupun maal) dari LAZ/BAZ secara tunai (berupa uang ataupun barang makanan/konsumsi); (4) merasa bahwa zakat dari LAZ/BAZ tersebut sangat besar/dominan guna membiayai kebutuhan ekonomi hidup; (5) merasa bahwa zakat dari LAZ/BAZ tersebut sangat besar/dominan guna membiayai kebutuhan ekonomi hidup; (6) menerima banyak manfaat dari kegiatan pemberdayaan tersebut bagi peningkatan kemandirian perekonomian, akan mendorong lahirnya kemandirian ekonomi responden.

Dari hasil analisis muatan (*loading*) pada Tabel 2, indikator variabel zakat berupa “merasa bahwa zakat dari LAZ/BAZ tersebut sangat besar/dominan guna membiayai kebutuhan ekonomi hidup”, memiliki nilai muatan (*loading*) tertinggi yaitu 0,849. Hal ini berarti bahwa keberadaan zakat yang diterima dari LAZ/BAZ sangat besar/dominan dalam membiayai kebutuhan ekonomi hidup, dirasakan sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi kemandirian ekonomi responden.

### ***Pengaruh Infak dan Sedekah Terhadap Kemandirian Ekonomi***

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan bahwa variabel infak dan sedekah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi. Hasil analisis menemukan bahwa hubungan variabel infak dan sedekah terhadap kemandirian ekonomi memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,434 dan nilai *p-values* sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur adalah positif dan nilai *p-values* lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel infak dan sedekah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi sehingga  $H_2$  dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap infak dan sedekah dengan indikator-indikator berupa: (1) sering mengikuti kegiatan pembinaan dan pemberdayaan (kewirausahaan, keterampilan, dsb) yang diselenggarakan oleh kantor/instansi pemerintah; (2) menerima banyak manfaat dari kegiatan pembinaan tersebut bagi kemandirian perekonomian; (3) mendapatkan bantuan permodalan dari Kantor/Dinas pemerintah untuk memajukan perekonomian/usaha; (4) bantuan modal yang diterima tersebut sangat besar dan mencukupi untuk usaha/bisnis; (5) sering mengikuti kegiatan pembinaan dan pemberdayaan (kewirausahaan, keterampilan, dsb.) yang diselenggarakan oleh perseorangan/ Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM); (6) menerima banyak manfaat dari kegiatan pembinaan/pemberdayaan tersebut bagi kemandirian perekonomian; (7) mendapatkan bantuan modal dari LSM untuk memajukan perekonomian/usaha; (8) bantuan modal tersebut sangat bermanfaat bagi kemajuan usaha/bisnis; (9) sering mengikuti kegiatan pembinaan dan pemberdayaan (kewirausahaan, keterampilan, dsb.) sesuai dengan bidang usaha yang diselenggarakan oleh lembaga zakat (BAZ/LAZ); (10) menerima banyak manfaat dari kegiatan pemberdayaan oleh BAZ/LAZ tersebut bagi kemandirian perekonomian; (11) mendapatkan bantuan modal dari BAZ/LAZ untuk memajukan perekonomian/usaha; (12) memperoleh banyak manfaat dari bantuan modal tersebut bagi kemajuan usaha/bisnis, akan mendorong lahirnya kemandirian ekonomi responden.

Dari hasil analisis muatan (*loading*) pada Tabel 2, indikator variabel infak dan sedekah berupa “sering mengikuti kegiatan pembinaan dan pemberdayaan (kewirausahaan, keterampilan, dsb.) sesuai dengan bidang usaha yang diselenggarakan oleh lembaga zakat (BAZ/LAZ)”, memiliki nilai muatan (*loading*) tertinggi yaitu 0,807. Hal ini berarti bahwa keberadaan infak dan sedekah berupa kegiatan pembinaan dan pemberdayaan (kewirausahaan, keterampilan, dsb.) sesuai dengan bidang usaha yang diselenggarakan oleh lembaga zakat (BAZ/LAZ), dirasakan sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi kemandirian ekonomi responden.

### **Pembahasan**

Zakat, infak, dan sedekah sangat membantu orang yang menerimanya (mustahik) dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Sedekah juga dapat mendorong mereka untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Kemandirian dalam memenuhi kebutuhan ekonomi merupakan idaman setiap orang, termasuk para mustahik. Walaupun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup, kemandirian menjadi faktor utama bagi lahirnya semangat untuk mampu memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut. Kemandirian tersebut juga menjadi aspek mikro yang harus diperhatikan dalam mencapai *falāḥ*.<sup>27</sup> Sedangkan *falāḥ*, kesejahteraan dunia dan akhirat, adalah tujuan yang ingin dicapai dalam konsep ekonomi Islam. Tanpa adanya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, maka sulit untuk mewujudkan *falāḥ* bagi setiap anggota masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa keberadaan zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh mustahik, diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam mencapai *falāḥ*, manusia dihadapkan pada berbagai masalah yang muncul. Masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmerataan distribusi sumber daya,
2. Keterbatasan manusia, dan
3. Konflik antartujuan hidup.<sup>28</sup>

Distribusi sumber daya atau kekayaan yang ada di masyarakat berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal ini sudah diisyaratkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah melebihkan sebagian manusia di atas sebagian yang lain. Sekelompok manusia hidup dalam keadaan berkecukupan sedangkan yang lain berada dalam keadaan kekurangan. Bahkan, sebagian manusia sangat bergantung pada belas kasihan orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena keterbatasan yang dimilikinya, mereka meminta-minta pada orang lain.

Di samping menciptakan manusia dalam kondisi yang berbeda-beda secara ekonomi, Allah swt. juga mengajarkan adanya zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk

<sup>27</sup>Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, h. 35.

<sup>28</sup>Munrokhim Misanam dkk, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: P3EI UII, 2011), h. 8 - 9.

transfer kekayaan dari si kaya kepada si miskin. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh zakat, infak, dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi.

Kesejahteraan merupakan tujuan semua aliran ekonomi, baik ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, maupun ekonomi Islam. Sebagai pelaku ekonomi, manusia memiliki tujuan hidup tercapainya kesejahteraan atau kemakmuran. Sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi menjadi sarana bagi manusia untuk mewujudkan tujuan hidupnya tersebut.

Dijadikannya kesejahteraan atau kemakmuran sebagai tujuan dari semua ajaran ekonomi terlihat misalnya dari buku Adam Smith yang berjudul *An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Melalui buku yang diterbitkan di tahun 1776 tersebut, Adam Smith menjanjikan tatanan kehidupan ekonomi yang baru yaitu dunia yang penuh dengan kemakmuran.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua pemikiran Adam Smith dalam buku tersebut. Bagaimana halnya dengan Karl Mark yang pemikirannya berbeda dengan Adam Smith. Karl Mark yang dikenal sebagai penggagas ekonomi sosialis pun menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan pemikirannya di bidang ekonomi. Karl Mark hanya berbeda dalam hal asumsi dan cara yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan atau kemakmuran tersebut. Baik kapitalisme maupun sosialisme memandang bahwa kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi atau kebutuhan yang bersifat materi dan duniawi.

Ekonomi Islam juga menjadikan kesejahteraan sebagai sebuah tujuan. Namun, kesejahteraan menurut konsep ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Ekonomi Islam dibangun di atas landasan Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi Islam tidak hanya mengutamakan kehidupan duniawi dalam mencapai kesejahteraan, tetapi juga sangat memperhatikan kehidupan akhirat. Bahkan pemenuhan kebutuhan akan materi duniawi dimaksudkan untuk mendukung kebahagiaan akhirat.

Karena perbedaan paradigma dalam memandang kesejahteraan yang menjadi tujuannya, ekonomi Islam menggunakan istilah yang berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, yakni dengan sebutan "falāḥ". Falāḥ merupakan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Kebaikan hidup di dunia dan akhirat diisyaratkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 201 sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

Terjemahnya:

"Dan di antara mereka ada orang yang berdo'a: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka."<sup>30</sup>

Adapun ciri-ciri orang yang mencapai *falāḥ* diisyaratkan dalam Q.S. al-Mu'minun/23: 1-11 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ۝ ٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ ٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ ٦ فَمَنْ

<sup>29</sup>Mark Skousen. *The Making of Modern Economics The Lives and Ideas of the Great Thinkers*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso. *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Sejarah Pemikiran Ekonomi*. 2009. Jakarta: Prenada Media Group, hal. 16-17.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 39.

أَبْتَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُونَ ۘ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۚ ۱۰ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۙ ۱۱

Terjemahnya:

“Sungguh beruntung orang yang beriman. Yaitu orang yang khusyu’ dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang menjaga amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Yakni mewarisi surga firdaus yang mereka kekal di dalamnya.”<sup>31</sup>

Dalam konteks ekonomi, salah satu ciri orang yang mendapatkan *falāh* adalah yang menunaikan zakat. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan telah berada dalam *falāh* atau sejahtera apabila telah berkewajiban menunaikan zakat. Di samping itu, orang tersebut juga mampu menghindari perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Mereka selalu menjaga ibadah shalatnya, menjaga kemaluannya dari perbuatan tercela, dan menjaga amanat yang dipikulnya. Orang-orang yang mencapai *falāh* juga akan mendapatkan balasan dari Allah berupa sorga firdaus dan mereka kekal di dalamnya.

Kata “*falāh*” juga sering dikumandangkan oleh para muadzin setiap mereka mengumandangkan adzan: *حي علي الفلاح*. Dengan bacaan tersebut muadzin mengajak orang-orang di sekitarnya untuk menuju “*falāh*”, kehidupan yang mendatangkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat.

Begitu pentingnya *falāh* atau kesejahteraan dalam Islam (dan ekonomi Islam), sampai-sampai negara yang dibentuk oleh Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin merupakan negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan merupakan negara yang pemerintahannya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya.<sup>32</sup> Negara kesejahteraan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. menyediakan jaminan sosial bagi semua orang terhadap kecelakaan, sakit, pengangguran, lanjut usia, dan cacat.
2. Berkeadilan sosial atau distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata di antara semua warga negaranya.
3. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan gratis atau sangat disubsidi pemerintah.
4. Mempertahankan tingkat *full employment* bagi angkatan kerja dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negara yang mampu bekerja.
5. Adanya kepemilikan publik atas fasilitas umum sehingga dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang disubsidi.<sup>33</sup>

Keberadaan gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan menandakan bahwa negara bersangkutan belum mencapai kesejahteraan. Gelandangan dan pengemis

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 475.

<sup>32</sup>Chaudry, Muhammad Syarif, *Funfamental of Islamic Economic System*. Terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 303.

<sup>33</sup>Chaudry, Muhammad Syarif, *Funfamental of Islamic Economic System*. Terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, h. 303-304.

menandakan bahwa negara belum mampu menyediakan kebutuhan ekonomi minimal bagi setiap warganya. Pengamen dan anak jalanan menandakan bahwa masih terdapat pengangguran yang dialami oleh warga negara yang mampu bekerja.

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak sebatas kesejahteraan materi, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual dan moral. Dalam memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan ekonominya, warga negara tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berorientasi pada etika, moral, dan agama yang mereka yakini. Guna mewujudkan kesejahteraan (*falāḥ*) bagi setiap warga negara, Chaudry,<sup>34</sup> menguraikan bahwa negara memiliki beberapa fungsi atau kewajiban sebagai berikut:

1. Menjamin dan melindungi fakir miskin. Bahkan negara merupakan wali bagi kaum fakir miskin, apabila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimumnya untuk hidup layak, maka mereka berhak untuk mendapatkan bantuan dari walinya, yakni negara.
2. Negara menjamin kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan bagi warga negaranya. Hal ini diisyaratkan dalam Q.S. Thaha/20: 118-119.

إِنَّ لَكَ أَلًا يَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِىٰ ۝ ١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحٰى ۝ ١١٩

Terjemahnya:

“Sungguh ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.”<sup>35</sup>

3. Menjaga keadilan sosial bagi semua warga negara. Negara tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan kesejahteraan bagi warganya.
4. Negara menekankan adanya hak-hak sosial atas harta individu. Negara harus mendorong masyarakat kaya memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang miskin. Apalagi jika masyarakat miskin tersebut merupakan keluarga atau kerabat dari masyarakat kaya.
5. Negara melindungi kaum yang lemah dari penindasan kaum yang kuat. Perlindungan ini mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, keamanan, maupun aspek kehidupan lainnya.
6. Negara memberikan prioritas terhadap pendidikan dan kesehatan warganya. Kedua bidang ini merupakan hal vital untuk menjaga kesejahteraan warga negara dan mendorong kemajuan secara berkelanjutan.
7. Negara memperhatikan kesejahteraan spiritual setiap warga negara. Negara melindungi setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Negara juga menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama yang berbeda-beda.

Kesejahteraan (*falāḥ*) menjadi keinginan setiap manusia. Untuk mencapainya, tidak tertutup kemungkinan timbul gesekan dan pertentangan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Untuk menjaga agar kehidupan masyarakat tetap harmonis dan damai, maka diperlukan peran negara. Bahkan negara berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Terhadap warga negara yang memiliki kondisi tidak memungkinkan untuk diberdayakan, maka negara harus melakukan pemeliharaan kepada mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945. Negara memiliki berbagai sumber

<sup>34</sup>Chaudry, Muhammad Syarif, *Funfamental of Islamic Economic System*. Terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, h. 306-315.

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. h. 444-445.

daya dan otoritas untuk melakukan pengaturan warga negaranya, termasuk dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sementara itu, terhadap mustahik yang masih memiliki potensi, maka negara harus memfasilitasi mereka sehingga lebih berdaya dan mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S. Al-Jum'ah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>36</sup>

Ayat di atas memerintahkan agar manusia mencari karunia Allah. Karunia tersebut berupa apa saja yang dapat memberikan manfaat kepada manusia, termasuk mencari rezeki secara halal. Q.S. Al-Taubah/9: 105 nyata-nyata memerintahkan umat Islam untuk bekerja sebagai berikut:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

١٠٥

Terjemahnya:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>37</sup>

Dengan ayat ini, Allah memerintahkan kaum muslimin (dan manusia pada umumnya) untuk beraktivitas, bekerja, ataupun beramal saleh. Dalam konteks muamalah, ayat ini memerintahkan umat Islam untuk bekerja mencari penghidupan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam ayat ini seolah-olah Allah ingin melihat seberapa kuat usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya melalui bekerja yang halal. Untuk selanjutnya, dengan sifat kasih sayang-Nya, Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan rezeki kepada hamba-Nya yang telah bekerja dan berusaha. Karena begitu kuatnya perintah bekerja ini, sampai-sampai Allah mengabarkan bahwa Rasulullah dan kaum muslimin ikut menyaksikan usaha hamba tersebut. Ayat ini juga menunjukkan begitu buruknya orang yang tidak mau bekerja dan hanya menunggu pemberian dan belas kasihan orang lain, padahal Allah telah memberikan kepada mereka kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.

## KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Zakat berpengaruh positif terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini berarti bahwa persepsi responden terhadap zakat yang diterima berdasarkan indikator-indikator yang diukur, akan mendorong lahirnya kemandirian ekonomi responden.

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 809.

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 273.

2. Infak dan sedekah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini berarti bahwa persepsi responden terhadap infak dan sedekah yang diterima berdasarkan indikator-indikator yang diukur, akan mendorong lahirnya kemandirian ekonomi responden.

Sebagai implikasi penelitian, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penanganan gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Apabila masalah ini tidak segera dituntaskan maka jumlah mereka semakin besar sehingga semakin sulit ditangani. Begitu pula, BAZ dan LAZ perlu menyentuh masyarakat gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Petugas dari BAZ dan LAZ harus turun langsung ke jalanan mendata mereka dan selanjutnya melakukan pemberdayaan terhadapnya. Masih banyak gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang tidak mengetahui eksistensi BAZ dan LAZ. Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah hendaknya ditujukan untuk program/kegiatan pemberdayaan yang mengarah pada meningkatnya produktivitas mustahik. Pemberdayaan ini mencakup kegiatan belajar-mengajar guna meningkatkan keterampilan sampai dengan pembinaan yang berkelanjutan. Pembinaan dan pendampingan yang terus-menerus akan mampu meningkatkan keberanian mustahik dalam merintis usaha sehingga dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Untuk itu, BAZ dan LAZ perlu saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dikelolanya. Koordinasi ini akan memperkuat kinerja lembaga pengelola zakat tersebut dan menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pendistribusian zakat. BAZ dan LAZ perlu memperbanyak sosialisasi dan pembelajaran ke masyarakat. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan eksistensi BAZ dan LAZ di masyarakat semakin kuat. Demikian juga dengan kepercayaan umat Islam terhadap lembaga ini sehingga mereka memanfaatkannya dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Habib. *Zakah, Macroeconomics Policies, and Poverty Alleviation: Lesson from Simulations on Bangladesh (Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 2004)*, h. 87-89.
- Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, h. 35.
- Beik, Irfan Syauqi. *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika (Jakarta: Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. 2, 2009)*, h. 52.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Media Group, 2009)*, h. 105.
- Chaudry, Muhammad Syarif, *Funfamental of Islamic Economic System*. Terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)*, h. 303.
- Chaudry, Muhammad Syarif, *Funfamental of Islamic Economic System*. Terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, h. 306-315.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), h. 55.
- Dogarawa, Ahmad Bello. *Poverty Alleviation Through Zakah and Waqf Institution: A Case for the Muslim Ummah in Ghana (Ghana: First National Muslim Summit organised by Al-Furqan Foundatuin, 2009)*, h. 23.
- Dua, Mikhael. *Filsafat Ekonomi (Yogyakarta: Kanisius, 2008)*, h. 17-18.

- Febianto, Irawan., dkk. *An Analysis on the Impact of Zakah Programs in Poverty Alleviation: Case Study in Bandung, Indonesia* (Bandung: Padjajaran University, 2011), h. 10.
- Ghozali, Imam. "Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19." *Semarang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro* (2011).
- Gusfahmi, *Rekonstruksi Peran Zakat dan Pajak Untuk Menanggulangi Kemiskinan* (Jakarta: Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol 2, 2009), h. 31-43.
- Iqbal, Munawar. *Zakah, Moderation and Aggregate Concumption in An Islamic Economy* (Jeddah: King Abdul Aziz University, Journal Research Islamic Economic, 1985), h. 45.
- Jogiyanto, Hartono M. "Metodologi Penelitian Bisnis: salah kaprah dan pengalaman-pengalaman." *Yogyakarta: BPFE* (2004).
- Kusuma, Dimas Bagus Wiranata. *The Power of Zakah in Poverty Alleviation*. (Selangor: University Kebangsaan Malaysia, 2010), h. 8.
- Misanam, Munrokhim, dkk. *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: P3EI UII, 2011), h. 8 - 9.
- Pena, Tim Prime. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gita Media Press, t.th.), h. 345.
- Riadi, Buyung . *Tindakan Sosial Anak Jalanan (Pengamen) di Kawasan Pantai Losari*, 2011.
- Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. *Microeconomics*. Terj. Nur Rosyidah dkk, *Ilmu Mikro Ekonomi*. (Jakarta: Media Global Edukasi, 2003), h. 470.
- Shirazi, Nashim Shah. *Providing for The Resource Shortfall for Poverty Elimination Through The Institution of Zakah in Low Income Muslim Countries* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia: *Journal of Economics and Management* 14, no. 1, 2006) h. 1.
- Skousen, Mark. *The Making of Modern Economics The Lives and Ideas of the Great Thinkers*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso. *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Sejarah Pemikiran Ekonomi*. 2009. Jakarta: Prenada Media Group, hal. 16-17.
- Yustika, Ahmad Erani, dan Jati Andrianto. *Zakat, Keadilan, dan Keseimbangan Sosial* (Jakarta: Zakat & Empowering, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. I, 2008).